

KEBERADAAN KERATON SELANGGGA CIAMIS SEBAGAI WARISAN SEJARAH DARI ABAD XIX-XXI

Habib Badrusalam¹, Yeni Wijayanti², Egi Nurholis³

^{1,2,3} Universitas Galuh Ciamis, Indonesia¹

E-mail Koresponden: HabibBadrusalam@gmail.com¹

ABSTRACT

Selanggga Palace, located in Ciamis Regency, is a historical heritage that reflects the political, social, and cultural dynamics of West Javanese society from the 19th to the 21st century. This study employs a qualitative approach with historical research methods. Data collection techniques include literature review, field observation, interviews, and documentation. Data analysis follows the interactive model by Miles, Huberman, and Saldaña. The results show that: (1) Selanggga Palace was built in 1859 by Raden Adipati Aria Kusumadiningrat, serving as a symbol of local power and a preservation hub for traditional values and cultural identity. Over time, it underwent functional transformations amidst physical challenges; (2) The palace houses rich historical collections, including traditional weaponry (keris, kujang, swords, spears), megalithic and classical stone artifacts, copperware, traditional musical instruments, ancient manuscripts, and genealogical documents; (3) Conservation efforts comprise preventive and curative conservation, museum revitalization, building renovation, and educational outreach to sustain local history.

Keywords: Selanggga Palace, historical heritage, 19th-21st century, local culture

ABSTRAK

Keraton Selanggga yang terletak di Kabupaten Ciamis merupakan salah satu peninggalan sejarah yang mencerminkan dinamika politik, sosial, dan budaya masyarakat Jawa Barat dari abad XIX hingga abad XXI. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode sejarah. Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Keraton Selanggga didirikan pada tahun 1859 oleh Raden Adipati Aria Kusumadiningrat dan berfungsi sebagai simbol kekuasaan lokal serta pusat pelestarian nilai tradisi dan identitas kultural masyarakat. Seiring perkembangan zaman, keraton ini mengalami transformasi fungsi dan menghadapi berbagai tantangan fisik serta struktural; (2) Keraton Selanggga menyimpan ragam koleksi benda bersejarah yang kaya, meliputi senjata pusaka (keris, kujang, pedang, tumbak), artefak megalitikum/klasik (arca, batu pemujaan, prasasti), wadah tembaga, alat musik tradisional (gamelan), serta naskah kuno dan dokumen silsilah; (3) Upaya pelestarian keraton dilaksanakan melalui konservasi preventif, konservasi kuratif, revitalisasi fungsi museum, renovasi fisik bangunan secara berkelanjutan, dan edukasi sejarah kepada masyarakat

Kata Kunci: Keraton Selanggga, warisan sejarah, abad XIX-XXI, budaya lokal

Cara citasi: Badrusalam, H., Wijayanti, Y., & Nurholis, E. (2026). Keberadaan Keraton Selanggga Ciamis Sebagai Warisan Sejarah dari Abad XIX-XXI. *J-KIP (Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan)*, 7 (3), 2026-2037.

PENDAHULUAN

Salah satu daerah yang memiliki kekayaan sejarah dan budaya yang sangat penting di Jawa Barat adalah Kabupaten Ciamis. Wilayah ini dikenal sebagai bagian dari kawasan Tatar Galuh yang memiliki kedudukan strategis dalam perkembangan sejarah Priangan Timur. Nama Galuh telah dikenal sejak masa kerajaan-kerajaan Sunda kuno dan menjadi salah satu pusat perkembangan politik serta kebudayaan di wilayah Jawa Barat bagian timur. Jejak keberadaan Galuh dapat ditemukan melalui berbagai sumber sejarah, baik berupa naskah kuno, prasasti, tradisi lisan, maupun peninggalan arkeologis yang tersebar di berbagai wilayah Ciamis (Lubis et al., 2016; Soedarmo, 2019). Keberadaan sumber-sumber tersebut menunjukkan bahwa Galuh bukan sekadar nama yang tercatat dalam sejarah, melainkan sebuah entitas politik dan budaya yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan masyarakat Sunda (Brata & Wijayanti, 2020).

Menurut Lubis et al. (2000), Galuh merupakan salah satu pusat peradaban penting yang mengalami perkembangan dalam berbagai periode sejarah, mulai dari masa klasik, masa pengaruh Hindu-Buddha, masa Islam, hingga masa kolonial. Perjalanan sejarah yang panjang tersebut meninggalkan berbagai warisan budaya yang masih dapat dijumpai hingga saat ini. Berbagai situs bersejarah, tradisi adat, kesenian tradisional, serta bangunan peninggalan masa lampau menjadi bukti keberlanjutan peradaban Galuh dari satu generasi ke generasi berikutnya (Prasetya & Ahmad, 2025). Warisan sejarah tersebut tidak hanya memiliki nilai akademik sebagai sumber penelitian, tetapi juga memiliki nilai sosial dan budaya yang penting bagi masyarakat setempat (Sudarto et al., 2025; Yuniar et al., 2026; Maulana et al., 2026).

Di antara berbagai peninggalan sejarah yang terdapat di Kabupaten Ciamis, Keraton Selagangga menempati posisi yang sangat penting. Keraton ini merupakan salah satu simbol sejarah yang berkaitan erat dengan perjalanan pemerintahan Galuh pada masa kolonial. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan perkembangan sistem pemerintahan lokal, tetapi juga menunjukkan proses perubahan sosial dan politik yang terjadi dalam masyarakat Galuh pada abad ke-19. Oleh karena itu, Keraton Selagangga dapat dipahami sebagai salah satu sumber sejarah yang memiliki nilai penting dalam upaya merekonstruksi perkembangan masyarakat Ciamis pada masa lalu (Tejakusumah et al., 2025).

Keraton Selagangga didirikan pada tahun 1859 oleh Raden Adipati Aria Kusumadiningrat yang menjabat sebagai Bupati Galuh ke-16. Tokoh ini dikenal memiliki peranan penting dalam perkembangan pemerintahan Galuh pada masa kolonial. Masa kepemimpinannya berlangsung ketika pemerintah kolonial Belanda melakukan berbagai perubahan administratif di wilayah Priangan (Azis et al., 2026). Dalam situasi tersebut, para pemimpin lokal berada pada posisi yang kompleks karena harus menjalankan fungsi pemerintahan daerah sekaligus berhadapan dengan kebijakan kolonial yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Pendirian Keraton Selagangga menjadi salah satu penanda penting dalam proses transformasi tersebut karena keraton ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan sekaligus simbol legitimasi kekuasaan lokal.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa Keraton Selagangga Ciamis merupakan warisan sejarah yang memiliki nilai penting dari berbagai aspek, baik historis, budaya, sosial, maupun edukatif. Keberadaannya merepresentasikan perjalanan panjang sejarah Galuh sekaligus menjadi simbol identitas budaya masyarakat Ciamis yang terus bertahan hingga masa kini. Fungsi keraton sebagai pusat pemerintahan pada masa lalu, transformasinya menjadi museum, keberadaan koleksi sejarah yang beragam, serta perannya dalam pelestarian tradisi budaya menunjukkan bahwa situs ini memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian mengenai Keraton Selagangga perlu dilakukan secara mendalam untuk mengungkap berbagai nilai sejarah yang terkandung di dalamnya serta memahami peranannya dalam kehidupan masyarakat masa kini. Kajian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan historiografi lokal, pelestarian warisan budaya, dan penguatan pendidikan sejarah berbasis kearifan lokal di Kabupaten Ciamis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menjaga dan melestarikan warisan sejarah sebagai bagian dari identitas dan kekayaan budaya bangsa.

Tujuan penelitian ini disusun sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, yaitu: untuk mengetahui dan mendeskripsikan latar belakang sejarah dan perkembangan Keraton Selagangga Ciamis dalam konteks pemerintahan Galuh hingga Kabupaten Ciamis pada abad XIX–XXI; menganalisis nilai-nilai historis yang terkandung dalam Keraton Selagangga Ciamis sebagai warisan sejarah masyarakat Galuh. dan mengevaluasi upaya pelestarian Keraton Selagangga Ciamis sebagai warisan sejarah di Kabupaten Ciamis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian sejarah (historis). Penelitian sejarah bertujuan merekonstruksi peristiwa dan proses masa lalu secara sistematis dan ilmiah melalui kajian terhadap sumber-sumber sejarah yang relevan (Gottschalk, 1986). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami makna, nilai, serta konteks sosial-budaya yang melekat pada keberadaan Keraton Selagangga sebagai warisan sejarah yang hidup dalam masyarakat (Moleong, 2017).

Prosedur penelitian sejarah dalam penelitian ini mengacu pada tahapan metodologis yang dikemukakan oleh Kuntowijoyo (2003), yang meliputi empat tahapan utama: (1) Heuristik, yaitu tahap pengumpulan sumber sejarah baik sumber primer maupun sekunder; (2) Kritik Sumber (Verifikasi), yaitu evaluasi keabsahan dan otentisitas sumber secara eksternal dan internal; (3) Interpretasi, yaitu penafsiran makna fakta-fakta sejarah yang terintegrasi; serta (4) Historiografi, yaitu penulisan kisah sejarah secara kronologis, analitis, dan sistematis.

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi sumber primer (koleksi artefak, bangunan keraton, naskah kuno, serta hasil wawancara dengan pemangku adat/pengelola) dan sumber sekunder (buku, jurnal, dan dokumen pendukung). Teknik pengumpulan data meliputi studi pustaka, observasi lapangan, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data kualitatif dilakukan dengan mengacu pada model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL PENELITIAN

1. Posisi Historis Keraton Selagangga dalam Perkembangan Pemerintahan Galuh

Hasil penelusuran literatur, pengamatan situs, dan inventarisasi peninggalan menunjukkan bahwa Keraton Selagangga memiliki kedudukan penting dalam sejarah pemerintahan Galuh pada abad XIX. Keberadaannya berkaitan erat dengan masa pemerintahan Raden Adipati Aria Kusumadiningrat sebagai Bupati Galuh. Data yang tersedia menunjukkan bahwa sejak 1853 R.A.A. Kusumadiningrat telah menempati kediaman yang disebut Keraton Selagangga. Pada periode berikutnya, terutama 1859–1877, berlangsung pembangunan sejumlah gedung pemerintahan di ibu kota kabupaten. Rangkaian tersebut memperlihatkan bahwa keberadaan Selagangga perlu ditempatkan dalam konteks perkembangan pusat pemerintahan Galuh pada pertengahan abad XIX, bukan dipahami sebagai bangunan yang berdiri secara terpisah dari perkembangan tata pemerintahan daerah (Lubis, 2000).

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan perlunya kehati-hatian terhadap penyebutan tahun 1859 sebagai tahun tunggal pendirian Keraton Selagangga. Dalam sumber yang ditelusuri, tahun 1853 muncul sebagai tahun awal penggunaan Selagangga oleh R.A.A. Kusumadiningrat, sedangkan periode 1859–1877 berhubungan dengan pembangunan fasilitas pemerintahan di ibu kota kabupaten. Dengan demikian, apabila penelitian tidak memiliki arsip pembangunan yang secara eksplisit mencatat tahun 1859 sebagai tahun pendirian keraton, formulasi yang lebih kuat secara akademik adalah bahwa Keraton Selagangga telah digunakan sebagai kediaman bupati setidaknya sejak 1853 dan berkembang dalam lingkungan pembangunan pemerintahan Galuh pada periode 1859–1877.

Kedudukan tersebut memberikan dasar yang lebih kuat untuk memahami fungsi Keraton Selagangga. Bukti yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh aktivitas

pemerintahan Kabupaten Galuh berlangsung di dalam bangunan keraton. Klaim yang lebih proporsional adalah bahwa Selagangga merupakan kediaman resmi bupati dan bagian dari lingkungan kekuasaan lokal pada masa pemerintahan R.A.A. Kusumadiningrat. Hubungan antara kediaman bupati, kompleks pemerintahan, fasilitas keagamaan, pendidikan, dan pembangunan kota menunjukkan adanya perubahan ruang politik Galuh pada pertengahan abad XIX.

Konteks tersebut berlangsung ketika pemerintah kolonial Belanda menjalankan kebijakan ekonomi yang membebani masyarakat melalui produksi komoditas seperti kopi dan nila. Pada periode yang sama, pemerintahan R.A.A. Kusumadiningrat tercatat melakukan pembangunan saluran air dan bendungan untuk mendukung pertanian masyarakat. Fakta tersebut memperlihatkan bahwa sejarah Selagangga berada dalam lingkungan politik kolonial, sehingga keberadaannya dapat dibaca sebagai bagian dari proses negosiasi antara pemerintahan lokal Galuh dan struktur pemerintahan kolonial, bukan semata-mata sebagai simbol kekuasaan tradisional.

2. Periodisasi Keberadaan Keraton Selagangga, Abad XIX–XXI

Temuan penelitian dapat dikelompokkan ke dalam empat fase perkembangan. Periodisasi ini lebih menjelaskan perubahan fungsi daripada sekadar membagi sejarah berdasarkan tahun.

a. Fase pertama: pembentukan dan penggunaan sebagai kediaman bupati pada pertengahan abad XIX.

Pada fase ini Selagangga berkaitan langsung dengan pemerintahan R.A.A. Kusumadiningrat. Informasi historis menunjukkan penggunaan Selagangga sebagai kediaman sejak 1853. Periode tersebut bertepatan dengan perkembangan pusat pemerintahan Galuh dan pembangunan sejumlah fasilitas pemerintahan antara 1859–1877.

b. Fase kedua: konsolidasi pemerintahan dan perubahan administratif pada akhir abad XIX hingga awal abad XX.

R.A.A. Kusumadiningrat memerintah hingga 1886 dan kemudian kedudukan bupati diteruskan oleh R.A.A. Kusumasubrata. Pada 1915 Kabupaten Galuh dimasukkan ke dalam Keresidenan Priangan dan secara resmi menggunakan nama Kabupaten Ciamis. Perubahan administratif tersebut menjadi konteks penting untuk memahami transformasi fungsi ruang kekuasaan lokal. Kedudukan politik bupati mengalami penyesuaian dalam struktur pemerintahan kolonial yang semakin birokratis.

c. Fase ketiga: perubahan fungsi dan pemeliharaan bangunan pada abad XX.

Informasi mengenai renovasi pada 1936 dan 1994 menunjukkan bahwa bangunan mengalami perubahan fisik dari waktu ke waktu. Hal ini penting secara historis karena bangunan yang bertahan sampai sekarang tidak dapat langsung diasumsikan identik dengan bentuk abad XIX. Keaslian historisnya perlu dipahami melalui hubungan antara unsur bangunan lama, perubahan konstruksi, serta fungsi baru yang berkembang setelah masa pemerintahan kolonial.

d. Fase keempat: musealisasi dan pemanfaatan budaya pada abad XXI.

Perubahan paling jelas terjadi ketika bangunan Selagangga digunakan sebagai ruang museum. Museum Galuh Pakuan diresmikan pada 18 Juli 2010. Sebelumnya, sejumlah benda pusaka disimpan di kompleks makam Kangjeng Prebu di Jambansari, sementara kerusakan ruang penyimpanan akibat gempa 2009 menjadi salah satu konteks pemindahan koleksi ke ruang museum. Dengan demikian, tahun 2010 dapat dipahami sebagai titik penting perubahan fungsi Selagangga dari ruang kediaman dan lingkungan kekuasaan menjadi ruang penyimpanan, penyajian, dan edukasi sejarah.

Periodisasi tersebut memperlihatkan bahwa keberlanjutan Keraton Selagangga tidak ditentukan oleh keutuhan satu fungsi. Keberadaannya bertahan melalui perubahan fungsi: dari ruang kediaman bupati, bagian dari lingkungan pemerintahan, bangunan yang mengalami penyesuaian fisik, hingga ruang museum dan pelestarian warisan budaya.

3. Koleksi sebagai Bukti Material dan Sumber Rekonstruksi Sejarah

Inventarisasi menunjukkan bahwa koleksi Keraton Selagangga mencakup senjata pusaka, artefak batu, perabot, gamelan, naskah, dokumentasi keluarga, serta perangkat penyimpanan pusaka. Informasi mengenai museum menunjukkan jumlah koleksi mencapai lebih dari 200 benda dan mencakup artefak dari periode Megalitik, Hindu-Buddha, hingga Islam.

Berdasarkan fungsi dan karakter bendanya, koleksi dapat dikelompokkan menjadi empat kelompok analitis.

- a. **Pertama**, koleksi yang berkaitan dengan kekuasaan, legitimasi, dan pertahanan, seperti keris, kujang, pedang, tumbak, mata tumbak, bedog, meriam kecil, dan peluru kalantak. Kehadiran kelompok ini memberikan informasi mengenai budaya benda yang berhubungan dengan otoritas, perlindungan, status sosial, dan praktik simbolik elite lokal. Akan tetapi, atribusi setiap benda kepada tokoh atau periode tertentu tetap membutuhkan data provenans, tahun pembuatan, bahan, teknik pembuatan, dan riwayat kepemilikan.
- b. **Kedua**, artefak keagamaan dan ritual, termasuk batu pemujaan, menhir, dolmen, lumpang, batu prasasti, dan benda-benda batu lainnya. Koleksi tersebut memperlihatkan bahwa museum menghubungkan sejarah Selagangga dengan rentang sejarah budaya Galuh yang jauh lebih panjang daripada usia bangunannya sendiri. Karena itu, penting membedakan antara usia bangunan Keraton Selagangga dan usia benda yang sekarang disimpan di dalamnya. Koleksi dari masa Megalitik atau Hindu-Buddha tidak dapat digunakan sebagai bukti bahwa bangunan Selagangga telah berdiri pada periode tersebut. Fungsinya adalah sebagai bukti mengenai sejarah kawasan dan kebudayaan Galuh yang kemudian dihimpun dalam ruang museum.
- c. **Ketiga**, koleksi yang merekam praktik sosial dan budaya, terutama gamelan, perabot, payung, keramik, guci, serta perlengkapan lainnya. Kelompok ini memberikan informasi mengenai kehidupan sosial, praktik seremoni, mobilitas benda, serta budaya material masyarakat elite. Nilainya semakin kuat apabila setiap objek dilengkapi keterangan asal, periode, fungsi, pengguna, dan riwayat pemindahan.
- d. **Keempat**, koleksi dokumenter, seperti naskah khotbah R.A.A. Kusumasubrata, buku silsilah keluarga bangsawan Galuh, foto tokoh, foto Keraton Selagangga, serta dokumentasi lainnya. Kelompok ini mempunyai nilai metodologis khusus karena memungkinkan hubungan antara benda material, tokoh, dan peristiwa historis ditelusuri melalui sumber tertulis dan visual.

Dengan klasifikasi tersebut, koleksi Keraton Selagangga dapat berfungsi sebagai sumber untuk merekonstruksi sejarah sosial dan politik Galuh. Namun, nilai informasinya tidak seragam. Benda yang memiliki provenans, dokumentasi, atau keterkaitan dengan tokoh tertentu memiliki daya evidensial berbeda dari benda yang hanya diketahui melalui tradisi penuturan. Karena itu, inventarisasi idealnya dilengkapi nomor registrasi, ukuran, bahan, teknik pembuatan, perkiraan periode, asal-usul, riwayat kepemilikan, kondisi fisik, dan dokumentasi fotografis.

4. Pelestarian Warisan *Tangible* dan *Intangible*

Temuan lapangan memperlihatkan bahwa pelestarian Keraton Selagangga berlangsung pada dua ranah yang saling berhubungan. Ranah pertama berupa pemeliharaan bangunan dan koleksi. Ranah kedua berupa keberlanjutan praktik budaya yang memberi makna sosial terhadap pusaka dan kawasan keraton.

Salah satu praktik yang masih berlangsung adalah jamasan pusaka. Dokumentasi kegiatan menunjukkan bahwa pusaka dibawa dari Keraton Selagangga menuju Situs Jambansari dan dibersihkan melalui rangkaian ritual yang melibatkan keluarga keturunan R.A.A. Kusumadiningrat, kuncen, masyarakat, budayawan, komunitas, dan pelajar. Pada periode sebelumnya kegiatan tersebut lebih terbatas pada keluarga dan kerabat, sedangkan perkembangannya membuka ruang partisipasi yang lebih luas.

Temuan ini memberikan dasar yang lebih konkret untuk menyebut adanya dimensi warisan budaya takbenda. Warisan tersebut bukan semata-mata keberadaan benda pusaka, melainkan pengetahuan mengenai cara memperlakukan pusaka, waktu pelaksanaan, pelaku, tata cara ritual, penggunaan air tertentu, serta hubungan antara Keraton Selagangga dan Jambansari. Dengan demikian, aspek takbenda dapat dipahami sebagai praktik sosial yang terus direproduksi melalui keterlibatan antargenerasi.

Meskipun demikian, data yang tersedia belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh masyarakat Ciamis memandang Keraton Selagangga dengan makna yang sama. Klaim mengenai keraton sebagai "simbol identitas masyarakat" perlu ditempatkan sebagai interpretasi yang bersumber dari praktik sosial dan narasi komunitas tertentu. Untuk memperkuat klaim tersebut, penelitian lanjutan perlu memperlihatkan variasi pandangan antara keluarga keturunan, pengelola, pemerintah daerah, masyarakat sekitar, pelajar, dan pengunjung.

Berdasarkan data penelitian, bentuk pelestarian yang dapat diidentifikasi mencakup pemeliharaan bangunan, penyimpanan koleksi, penataan museum, kegiatan edukasi, dokumentasi, serta pelaksanaan tradisi jamasan. Museum Galuh Pakuan sendiri telah berfungsi sebagai ruang penyimpanan dan penyajian koleksi sejak 2010.

Pada aspek koleksi, keberadaan ruang museum memberikan perubahan penting dalam sistem penyimpanan karena benda-benda yang sebelumnya berada di lokasi penyimpanan lain dapat dihimpun dalam ruang pameran dan edukasi. Pada aspek budaya, pelaksanaan jamasan menunjukkan adanya keberlanjutan praktik yang menghubungkan benda pusaka dengan komunitas pendukungnya.

Sebaliknya, data penelitian yang tersedia belum memungkinkan penilaian teknis mengenai efektivitas konservasi preventif atau kuratif. Belum terdapat data terukur mengenai suhu, kelembapan relatif, intensitas cahaya, serangan hama, material penyebab kerusakan, metode restorasi, bahan konservasi, atau perubahan kondisi objek sebelum dan sesudah perawatan. Oleh sebab itu, istilah yang paling tepat berdasarkan evidensi yang tersedia adalah pemeliharaan dan upaya pelestarian koleksi, bukan keberhasilan konservasi teknis.

PEMBAHASAN

1. Keraton Selagangga sebagai Ruang Negosiasi antara Kekuasaan Lokal dan Struktur Kolonial

Makna historis Keraton Selagangga menjadi lebih jelas ketika ditempatkan dalam perubahan pemerintahan Galuh pada abad XIX. Keberadaan keraton bertepatan dengan periode ketika bupati menjadi bagian dari struktur pemerintahan kolonial sekaligus tetap memiliki kedudukan penting dalam masyarakat lokal. R.A.A. Kusumadiningrat memerintah dalam situasi ketika pemerintah kolonial menerapkan kebijakan ekonomi yang memengaruhi masyarakat Galuh, sementara pemerintah lokal menjalankan pembangunan irigasi, pendidikan, dan fasilitas pemerintahan.

Konteks tersebut membuat Keraton Selagangga lebih tepat dipahami sebagai ruang pertemuan antara dua sistem kekuasaan. Di satu sisi terdapat tradisi politik dan sosial lokal yang melekat pada figur bupati. Di sisi lain terdapat birokrasi kolonial yang semakin terstruktur. Pembangunan fasilitas seperti gedung kabupaten, kantor Asisten Residen, tangsi militer, penjara, kantor kontrolir, dan fasilitas komunikasi dalam perkembangan kota Ciamis memperlihatkan semakin kuatnya diferensiasi ruang pemerintahan pada akhir abad XIX dan awal abad XX (Saptono, 2018; Rustamaji, 2020).

Dengan kerangka tersebut, klaim bahwa Keraton Selagangga "merepresentasikan pemerintahan lokal" memperoleh dasar yang lebih kuat apabila dipahami sebagai bagian dari lingkungan kekuasaan bupati, bukan sebagai satu-satunya pusat administrasi. Pembedaan ini penting untuk menghindari pembesaran fungsi keraton yang tidak didukung sumber primer.

2. Perubahan Fungsi Lebih Signifikan daripada Kebertahanan Bentuk

Salah satu temuan penting penelitian adalah bahwa keberlanjutan Selanganga terutama terlihat melalui perubahan fungsi. Bangunan yang pada pertengahan abad XIX berhubungan dengan kediaman bupati kemudian berada dalam konteks perubahan birokrasi dan administrasi, mengalami renovasi, dan pada abad XXI digunakan sebagai museum (Povotong, 2011).

Pola tersebut sejalan dengan pemikiran Sedyawati (2012) bahwa pelestarian warisan budaya mencakup keberlanjutan nilai, makna, dan pemanfaatan, bukan hanya mempertahankan material fisik (Alfarizi et al., 2025; Nuraeni et al., 2025; Nafilah et al., 2025). Dalam perspektif Feilden (2003), perubahan fungsi dapat diterima sepanjang pengelolaan tersebut mempertahankan nilai penting, karakter, dan keaslian objek (Araoz, 2013; Khalaf, 2020; Havinga et al., 2020).

Dalam konteks Selanganga, fungsi museum sejak 2010 menunjukkan bentuk adaptasi yang memungkinkan bangunan tetap memiliki kegunaan sosial. Peresmian Museum Galuh Pakuan pada 2010 dan pemindahan koleksi setelah kerusakan tempat penyimpanan akibat gempa 2009 memperlihatkan bahwa perubahan fungsi tersebut berkaitan dengan kebutuhan konkret untuk mengamankan dan mengomunikasikan koleksi sejarah (Ormond-Parker & Sloggett, 2012; Li, & Tang, 2023).

Karena itu, indikator keberlanjutan Selanganga sebaiknya tidak dirumuskan hanya berdasarkan fakta bahwa bangunan masih berdiri. Indikator yang lebih terukur meliputi keberlanjutan penggunaan museum, keberadaan koleksi yang terdokumentasi, kegiatan edukasi, keterlibatan komunitas, kesinambungan ritual jamasan (Kartika & Nurholis, 2025), pemeliharaan bangunan, serta kemampuan pengelola menyediakan akses pengetahuan kepada publik.

3. Nilai Historis Keraton Selanganga

Berdasarkan temuan, nilai historis Keraton Selanganga dapat dirumuskan dalam beberapa dimensi.

a. Pertama, nilai sebagai bukti sejarah pemerintahan lokal.

Keterkaitan Selanganga dengan masa pemerintahan R.A.A. Kusumadiningrat menjadikannya sumber penting untuk memahami perubahan pemerintahan Galuh pada abad XIX. Nilai ini semakin kuat apabila dikaitkan dengan perkembangan gedung pemerintahan dan perubahan administratif Galuh hingga menjadi bagian dari Keresidenan Priangan pada 1915.

b. Kedua, nilai sebagai sumber sejarah sosial dan budaya.

Koleksi senjata, gamelan, keramik, perabot, naskah, foto, dan perlengkapan lainnya memberikan gambaran mengenai budaya material masyarakat Galuh. Nilai ini tidak berada pada benda secara individual saja, tetapi pada hubungan antarbenda dan konteks penggunaannya.

c. Ketiga, nilai dokumenter.

Naskah, silsilah, foto, dan arsip keluarga mempunyai potensi sebagai sumber sejarah primer atau sekunder untuk menghubungkan objek material dengan tokoh, keluarga, dan peristiwa. Namun, setiap dokumen perlu diuji asal-usul, waktu pembuatan, pembuat, dan kontinuitas transmisinya.

d. Keempat, nilai edukatif.

Transformasi menjadi museum sejak 2010 memberikan fungsi baru sebagai ruang pembelajaran sejarah lokal. Museum Galuh Pakuan menempatkan koleksi dalam konteks sejarah Galuh dan menyediakan akses bagi masyarakat, pelajar, serta peneliti.

e. Kelima, nilai keberlanjutan budaya.

Tradisi jamasan menunjukkan bahwa sebagian koleksi masih memiliki fungsi sosial dan simbolik dalam kehidupan komunitas (Kartika & Nurholis, 2025). Praktik tersebut

memperlihatkan hubungan antara benda, tempat, pelaku, ritual, dan memori kolektif (Yuniar et al., 2026; Maulana et al., 2026).

Kelima nilai tersebut memperlihatkan bahwa signifikansi Selagangga bersifat berlapis. Nilainya berasal dari hubungan antara bangunan, koleksi, dokumen, praktik budaya, dan perubahan sosial yang berlangsung dalam rentang waktu panjang.

4. Pelestarian dalam Perspektif Sedyawati, Feilden, dan Undang-Undang Cagar Budaya

Konsep pelestarian yang dikemukakan Sedyawati (2012) dapat digunakan untuk membaca Selagangga melalui keberlanjutan nilai dan makna. Sementara itu, Feilden (2003) memberikan kerangka mengenai pentingnya mempertahankan keaslian dan nilai penting melalui pengelolaan yang terencana. Kedua perspektif tersebut memperoleh relevansi dalam konteks Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang menempatkan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan sebagai bagian dari proses pelestarian. Jika kerangka tersebut diterapkan pada Selagangga, maka pelestarian dapat dibedakan menjadi tiga lapisan.

- a. Pada lapisan **perlindungan**, keberadaan bangunan museum dan penyimpanan koleksi merupakan bentuk pengamanan fisik dasar. Pemindahan koleksi ke Museum Galuh Pakuan setelah kerusakan tempat penyimpanan akibat gempa 2009 menjadi contoh tindakan perlindungan yang memiliki dasar empiris.
- b. Pada lapisan **pengembangan**, fungsi bangunan sebagai museum memperluas nilai guna warisan. Koleksi yang sebelumnya berada dalam ruang penyimpanan dapat diakses sebagai sumber pendidikan sejarah. Pengembangan semacam ini sesuai dengan prinsip bahwa warisan budaya dapat dimanfaatkan sepanjang nilai pentingnya tetap dijaga.
- c. Pada lapisan **pemanfaatan**, kegiatan pendidikan, kunjungan, penelitian, dan ritual budaya memberikan fungsi sosial baru kepada kawasan Selagangga. Jamasan memperlihatkan bentuk pemanfaatan yang berbeda dari museumisasi karena melibatkan dimensi ritual dan komunitas (Kartika & Nurholis, 2025).

Kerangka tersebut memperlihatkan bahwa pelestarian Selagangga belum tepat dinilai hanya dari keberadaan renovasi atau museum. Penilaian yang lebih objektif perlu melihat hubungan antara kondisi material, dokumentasi, akses publik, praktik budaya, kapasitas pengelola, dan keberlanjutan partisipasi komunitas.

Temuan penelitian menunjukkan adanya beberapa batas yang perlu diperhatikan:

- a. Pertama, tahun pendirian perlu diverifikasi melalui arsip primer. Perbedaan antara keterangan 1853 dan 1859 menunjukkan adanya kemungkinan perbedaan definisi antara "pendirian bangunan", "mulai ditempati", dan "perkembangan kompleks pemerintahan".
- b. Kedua, hubungan Selagangga dengan pemerintahan kolonial telah terlihat dalam konteks historis yang lebih luas, tetapi belum cukup untuk menyimpulkan secara rinci bentuk administrasi yang berlangsung di dalam keraton. Penelitian berikutnya perlu menelusuri arsip pemerintahan, laporan kolonial, peta kota, surat keputusan pengangkatan bupati, serta dokumen pembangunan.
- c. Ketiga, klaim mengenai warisan budaya takbenda telah memperoleh indikasi empiris melalui keberlanjutan jamasan, tetapi cakupan makna sosialnya masih perlu diperdalam melalui wawancara dengan pelaku, keluarga keturunan, pengelola, masyarakat sekitar, pelajar, dan pengunjung.
- d. Keempat, kondisi konservasi teknis belum dapat dinilai secara memadai tanpa pengukuran lingkungan dan dokumentasi intervensi konservasi. Penelitian sebaiknya membedakan istilah pemeliharaan, perawatan, konservasi, dan restorasi sesuai tingkat bukti yang tersedia.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa keberadaan Keraton Selagangga dari abad XIX hingga XXI dapat dipahami melalui transformasi fungsi, kontinuitas material, dan keberlanjutan praktik budaya. Perspektif tersebut menghasilkan pembacaan yang lebih

komprehensif daripada menempatkan keraton sebagai bangunan bersejarah yang sekadar bertahan dari masa lalu.

Kontribusi utama penelitian terletak pada penggabungan tiga jenis bukti: sejarah ruang dan pemerintahan, koleksi material, serta praktik pelestarian budaya. Ketiganya memperlihatkan bahwa keberlanjutan Selagangga berlangsung melalui proses adaptasi. Bangunan mengalami perubahan, koleksi berpindah dan dikurasi, sementara praktik budaya tertentu tetap dijalankan oleh komunitas pendukung.

Dengan demikian, keberadaan Keraton Selagangga pada abad XXI tidak semata-mata ditentukan oleh usia bangunan. Keberlanjutannya ditopang oleh kemampuan kawasan tersebut mempertahankan hubungan antara tempat, benda, dokumen, memori sejarah, dan praktik budaya. Museumisasi pada 2010 menjadi salah satu titik penting dalam proses tersebut, sedangkan keberlanjutan jaman menunjukkan bahwa hubungan antara pusaka dan komunitas masih memiliki ruang dalam kehidupan budaya kontemporer (Kartika & Nurholis, 2025).

Temuan ini sekaligus mengoreksi pemahaman yang terlalu sederhana mengenai "pelestarian". Pelestarian Selagangga bukan proses mempertahankan kondisi masa lalu secara utuh, karena bangunan telah mengalami perubahan dan fungsi telah bergeser. Pelestarian lebih tepat dipahami sebagai proses mengelola perubahan dengan tetap mempertahankan nilai penting yang dapat dipertanggungjawabkan secara historis, material, sosial, dan budaya (Maulana et al., 2026).

Dalam konteks tersebut, Keraton Selagangga dapat ditempatkan sebagai warisan sejarah yang mengalami transformasi fungsi dari ruang kekuasaan lokal menjadi ruang memori, museum, dan praktik budaya. Formulasi ini lebih sesuai dengan evidensi yang tersedia dan memberikan dasar yang lebih kuat untuk menjelaskan keberadaan Selagangga sebagai warisan sejarah dari abad XIX hingga abad XXI.

KESIMPULAN

Keraton Selagangga Ciamis merupakan warisan sejarah yang merekam perubahan pemerintahan, kehidupan sosial budaya, dan praktik pelestarian masyarakat Galuh dari abad XIX hingga abad XXI. Berdasarkan penelusuran literatur dan bukti yang tersedia, Selagangga telah digunakan sebagai kediaman R.A.A. Kusumadinigrat sejak 1853, sedangkan periode 1859–1877 berkaitan dengan perkembangan pembangunan fasilitas pemerintahan. Temuan ini menunjukkan bahwa Selagangga merupakan bagian dari lingkungan kekuasaan bupati dan perkembangan pemerintahan Galuh, sehingga klaim sebagai satu-satunya pusat administrasi perlu dihindari tanpa dukungan arsip primer.

Keberadaan Selagangga memperlihatkan transformasi fungsi dari ruang yang berkaitan dengan kekuasaan lokal menjadi ruang pelestarian sejarah dan museum. Perubahan tersebut berlangsung melalui penyesuaian fisik bangunan, pengelolaan koleksi, serta musealisasi yang ditandai dengan peresmian Museum Galuh Pakuan pada 2010. Koleksi berupa senjata pusaka, artefak batu, gamelan, perabot, naskah, arsip, dan dokumentasi memiliki nilai sebagai sumber sejarah material dan dokumenter. Nilainya perlu dipahami berdasarkan provenans, fungsi, konteks penggunaan, dan riwayat kepemilikan.

Nilai historis Keraton Selagangga mencakup aspek pemerintahan lokal, sejarah sosial budaya, dokumentasi, pendidikan, dan keberlanjutan praktik budaya. Tradisi jaman pusaka menunjukkan adanya kesinambungan pengetahuan dan praktik budaya yang menghubungkan benda, tempat, pelaku, dan komunitas. Pelestarian Selagangga berlangsung melalui pemeliharaan bangunan dan koleksi, fungsi museum, edukasi, dokumentasi, serta kegiatan budaya. Dengan demikian, keberlanjutan Keraton Selagangga terutama ditunjukkan melalui kemampuan mempertahankan nilai dan fungsi sosialnya di tengah perubahan zaman.

REKOMENDASI

Pelestarian Keraton Selagangga perlu diperkuat melalui penelusuran arsip primer untuk memastikan kronologi bangunan, fungsi pemerintahan, serta perubahan fisiknya dari abad XIX hingga XXI. Pengelola perlu menyusun inventaris koleksi berbasis provenans yang memuat identitas, bahan, periode, asal-usul, riwayat kepemilikan, fungsi, kondisi, dan dokumentasi setiap objek. Digitalisasi naskah, foto, arsip, dan koleksi penting perlu dikembangkan sebagai strategi dokumentasi dan mitigasi risiko.

Penilaian konservasi juga perlu didukung data teknis mengenai suhu, kelembapan, pencahayaan, hama, kondisi material, dan riwayat perawatan sehingga istilah konservasi preventif maupun kuratif dapat digunakan secara tepat. Tradisi jamasan perlu diteliti melalui wawancara dan observasi untuk mendokumentasikan pengetahuan, pelaku, perubahan praktik, serta makna yang diberikan kelompok masyarakat yang berbeda.

Museum Galuh Pakuan perlu mengembangkan tata pameran berbasis konteks sejarah dengan menghubungkan koleksi, tokoh, peristiwa, dan perubahan sosial. Pelibatan sekolah, komunitas, keluarga keturunan, dan masyarakat sekitar perlu diperkuat agar pelestarian berlangsung partisipatif dan berkelanjutan. Evaluasi berkala dapat menggunakan indikator kondisi bangunan, koleksi, aktivitas edukasi, keterlibatan masyarakat, dan keberlanjutan praktik budaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan penelitian mengenai keberadaan Keraton Selagangga Ciamis sebagai warisan sejarah dari abad XIX hingga abad XXI. Apresiasi disampaikan kepada pengelola Keraton Selagangga dan Museum Galuh Pakuan, keluarga keturunan R.A.A. Kusumadiningrat, masyarakat sekitar, serta para informan yang telah memberikan informasi, akses terhadap koleksi, dan keterangan mengenai sejarah serta praktik budaya yang berkaitan dengan Keraton Selagangga.

Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu proses studi literatur, observasi lapangan, dokumentasi, dan penelusuran sejarah lokal. Dukungan tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperoleh data dan memperkaya pemahaman mengenai perkembangan fungsi, koleksi, nilai historis, dan upaya pelestarian Keraton Selagangga.

Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian sejarah lokal, pelestarian warisan budaya, serta penguatan pemanfaatan Keraton Selagangga sebagai sumber pembelajaran dan pengetahuan bagi masyarakat.

DEKLARASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN GENERATIF DALAM PROSES PENULISAN

Selama proses penulisan manuskrip ini, penulis menggunakan ChatGPT untuk membantu penyempurnaan bahasa dan pemeriksaan tata bahasa. Penulis telah meninjau dan menyunting seluruh konten yang dihasilkan oleh alat tersebut serta bertanggung jawab sepenuhnya atas isi artikel yang diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarizi, R., Brata, Y. R., & Sudarto, S. (2025). Value of Local Wisdom in the Nadran Tradition at the Ki Buyut Manguntapa Site in Baregbeg District, Ciamis. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1(2), 206-229. <https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i2.5490>
- Araoz, G. (2013). Conservation philosophy and its development: Changing understandings of authenticity and significance. *Heritage & Society*, 6(2), 144-154. <https://doi.org/10.1179/2159032X13Z.00000000010>
- Azis, H. Y. M. A., Priangani, A., Utama, W., & Bayu, I. K. (2026). *Babad Tanah Sumedang*. Dunia Penerbitan buku.

- Brata, Y. R., & Wijayanti, Y. (2020). Dinamika Budaya Dan Sosial Dalam Peradaban Masyarakat Sunda Dilihat Dari Perspektif Sejarah. *Jurnal Artefak*, 7(1), 1-12.
- Feilden, B. M. (2003). *Conservation of Historic Buildings* (3rd ed.). Architectural Press.
- Gottschalk, L. (1986). *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto). Universitas Indonesia Press.
- Havinga, L., Colenbrander, B., & Schellen, H. (2020). Heritage significance and the identification of attributes to preserve in a sustainable refurbishment. *Journal of Cultural Heritage*, 43, 282-293. <https://doi.org/10.1016/j.culher.2019.08.011>
- Kartika, I. D., & Nurholis, E. (2025). Exploring the Dynamics of Local Cultural Change in Cintanagara: Between Tradition and Modernity. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1(1), 52-67. <https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i1.5401>
- Khalaf, R. W. (2020). Authenticity or continuity in the implementation of the UNESCO World Heritage Convention? Scrutinizing statements of outstanding universal value, 1978–2019. *Heritage*, 3(2), 243-274. <https://doi.org/10.3390/heritage3020015>
- Kuntowijoyo. (2003). *Metodologi Sejarah* (Ed. 2). Tiara Wacana.
- Li, L., & Tang, Y. (2023). Towards the contemporary conservation of cultural heritages: An overview of their conservation history. *Heritage*, 7(1), 175-192. <https://doi.org/10.3390/heritage7010009>
- Lubis, N. H., & Mahmud, M. I. (2000). *Sejarah Tatar Sunda*. Satya Historika.
- Lubis, N. H., Mumuh Muhsin, Z., Sofianto, K., Mahzuni, D., Widyonugrohanto, R. M., & Darsa, U. A. (2016). Rekonstruksi Kerajaan Galuh Abad VIII-XV. *Paramita: Historical Studies Journal*, 26(1), 9-22.
- Maulana, A. I., Sudarto, S., & Ramdani, D. (2026). Reconstructing the Integrated Galuh Cultural Value System: Cultural Memory, Social Cohesion, Ethical Governance, and Historical Consciousness in the Gandoang Manuscript. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2(2), 211-245. <https://doi.org/10.25157/jamasan.v2i2.6149>
- Maulana, F. A., Ramdani, D., & Salsabila, G. T. (2026). Ritual Performance as Cultural Memory Work: Re-enacting History, Sacred Landscapes, and Spiritual Ecology in the Nyiar Lumar Ritual of Kawali-Ciamis. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2(1), 124-142. <https://doi.org/10.25157/jamasan.v2i1.5854>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Ed. Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nafilah, M. A., Ramdani, D., & Sudarto, S. (2025). Preserving Cultural Narratives Through Aros Woven Fabric Crafts And The Philosophical Meaning Of Their Motifs: A Case Study Of The Baduy Indigenous Community. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1(2), 127-147. <https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i2.5454>
- Nuraeni, S., Agustin, F., Widana, K., Januar, H., Aditya, F. F., & Sudarto, S. (2025). Conservation Through Eco-Spirituality: A Philosophical Approach to the Residential Patterns and Traditional Architecture of the Kampung Adat Kuta. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 1(1), 68-86. <https://doi.org/10.25157/jamasan.v1i1.5316>
- Ormond-Parker, L., & Sloggett, R. (2012). Local archives and community collecting in the digital age. *Archival Science*, 12(2), 191-212. <https://doi.org/10.1007/s10502-011-9154-1>
- Povatong, P. (2011). *Building siwilai: Transformation of architecture and architectural practice in Siam during the reign of Rama V, 1868-1910*. University of Michigan.
- Prasetya, T. I., & Ahmad, I. (2025). *Pengantar Studi Kebantenan, Masa Prasejarah Banten Megalitikum Dan Sejarah Pra Islam*. Global Kreatif Media.
- Republik Indonesia. (2010). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya*. Lembaran Negara RI Tahun 2010 No. 130.

- Rustamaji, I. (2020). *Pengaruh Perkembangan Bangunan Indis Terhadap Sosial Dan Budaya Masyarakat Kabupaten Boyolali Tahun 1910-1915*. Deepublish.
- Saptono, N. (2018). *Tata ruang kota Ciamis pasca perdagangan dunia abad ke-19–20*. Balai Arkeologi Jawa Barat.
- Sedyawati, E. (2012). *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. RajaGrafindo Persada.
- Soedarmo, U. R. (2019). Situs Cagar Budaya Sanghyang Maharaja Cipta Permana Prabudigaluh Salawe Dusun Tunggal Rahayu Desa Cimaragas Kecamatan Cimaragas Kabupaten Ciamis. *Jurnal Artefak*, 3(2), 173-186.
- Sudarto, S., Wardo, W., Sariyatun, S., & Musadad, A. A. (2025). Integrasi Pedagogi Reflektif dan Eco-Pedagogy dalam Konstruksi Kausalitas Sejarah: Membangun Kesadaran Nilai Lingkungan melalui Landscape Budaya dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 12(1), 213-236. <http://doi.org/10.25157/ja.v12i1.20669>
- Tejakusumah, Y., Setialesmana, D., & Natalliasari, I. (2025). *Eksplorasi Etnomatematika Pada Pendopo Keraton Selanggan Ciamis*. Cartesius: Jurnal Pendidikan Matematika, 98-106.
- Yuniar, M. H., Novia, N., & Sudarto, S. (2026). Misalin Tradition as Living Ecological Heritage: Reproducing Environmental Ethics and Eco-cultural Resilience through Ritual Practice. *JAMASAN: Jurnal Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 2(2), 281-312. <https://doi.org/10.25157/jamasan.v2i2.6163>